

DESKRIPSI MATA KULIAH

| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | DISKRIPSI |
|----|-------------------|--|---|
| 1. | 81302-0201 | Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum | <p>Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar-dasar metode penelitian, cara melakukan penelitian kepastasaan dan memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Substansi mata kuliah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar-dasar metode penelitian; b. Langkah-langkah penelitian; c. Penyusunan Usulan Penelitian dan Rencana Penelitian; d. Tata cara penelitian kepastasaan (hukum) dan e. Penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan. |
| 2. | 81302-0402 | Tesis | <p>Karya tulis berdasarkan penelitian mahasiswa sendiri dalam bentuk tesis yang harus dipertanggung-jawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas komisi pembimbing dan para penelaah yang ditetapkan.</p> |
| 3. | 81302-0103 | Teori Hukum | <p>Mata kuliah ini mengkaji seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dan/ atau realitas hukum, yang wujudnya berupa keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala dan/atau realitas tersebut kepada publik.</p> |
| 4. | 81302-0104 | Filsafat Hukum | <p>Mata kuliah Filsafat Hukum merupakan kajian terhadap hakekat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berfikir logis, kritis dan radikal dalam mengalisis dan mengimplentasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakekat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (<i>begrief des rechts</i>), gagasangagasan tentang tujuan hukum (<i>geltung des recht</i>)</p> |

| | | | |
|----|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | dan motif-motif mengapa manusia mau mentaati hukum (<i>zweck des rechts</i>). Keterampilan berfikir logis adalah trampil mendiskripsikan atau memaparkan fakta hukum secara objektif; berfikir kritis adalah menemukan posisi dan relasi <i>stakeholders</i> ; dan berfikir radikal adalah menemukan hakekat permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan alternatif solusi atau pemecahan masalah hukumnya. |
| 5. | 81302-0105 | Hukum Dan Globalisasi | Mata kuliah ini membahas teori hukum dan aplikasinya, hubungan timbal balik antara struktur masyarakat dengan hukum, yaitu hubungan antara lembaga sosial dengan hukum. Mata kuliah ini menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam mengkaji hukum. Fokus dari sosiologi hukum karenanya membahas teori-teori di dalam hukum dan sosial, perubahan sosial dan hukum, hukum sebagai mekanisme integratif, hukum dan kekuasaan, hukum dan pembangunan dan hukum dan globalisasi. |
| 6. | 81302-0106 | Politik Hukum | Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktivitas Negara dan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (<i>ius constituendum</i>). Fokus: pengkajian tentang latar belakang, arah-perkembangan, proses, produk dan tujuan hukum yang dicita-citakan. |
| 7. | 81302-0107 | Perbandingan Sistem Hukum | Mata kuliah ini membahas membandingkan karakteristik antara sistem-sistem hukum dan lembaga hukum yang ada di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang meliputi sejarah, tujuan, fungsi, struktur dan sumber hukumnya dengan menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Lebih jauh lagi menjelaskan latar belakang, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan tersebut. |
| 8. | 81302-0208 | Teori Perbandingan Dan Konstitusi | Mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang teori terkait dengan konstitusi dan hubungannya dengan negara dan relasinya dengan antara institusi |

| | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| | | | negara dan warga negara. Topik-topik yang dibahas adalah: teori-teori tentang konstitusi, hukum konstitusi, pengertian konstitusi, hakekat konstitusi, klasifikasi konstitusi, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan dan perubahan konstitusi, pembentukan, perubahan UUD 1945 sampai dengan sekarang, dan <i>constitutional adjudication</i> , serta perbandingan konstitusi di Negara lain. |
| 9. | 81302-0209 | Hukum Penyelenggaraan Negara | Mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang teori-teori mengenai hukum tata pemerintahan; definisi, unsur-unsur hukum tata pemerintahan; obyek/sasaran hukum tata pemerintahan; fungsi dan wewenang pejabat tata usaha negara, teori kebatalan, produk hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah; keputusan Tata Usaha Negara; kekuatan hukum keputusan Tata Usaha Negara; pembuatan produk hukum dan teorinya; hukum benda negara, hukum sarana negara; pengaturan terhadap aparat pemerintah. |
| 10. | 81302-0210 | Teori Dan Metode Perancangan Perundang-undangan | Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Pembahasan difokuskan antara lain: Teori perundang-undangan; Aspek hukum dari perundangundangan; Filosofi perundang-undangan; Hirarki perundang-undangan; Perancangan peraturan perundang-undangan, baik dari segi yuridis, teknis dan administrasi perundang-undangan. |
| 11. | 81302-0211 | Kriminologi | Mata kuliah ini membahas mengenai kriminologi dalam perspektif sosiologi, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan yang disebabkan oleh hubungan manusia dalam sebuah masyarakat atau kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat. Materi kuliah kriminologi mengkaji tentang pengertian dan ruang lingkup kriminologi, mazhab-mazhab dan teori-teori kriminologi, teori anomie dan subkultur, teori labeling dan konflik, dan teori control. |
| 12. | 81302-0212 | Sistem Peradilan | Mata kuliah ini membahas |

| | | | |
|-----|-------------------|---------------------------|--|
| | | Pidana | mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan teori dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana, dan ruang lingkup mata kuliah sistem peradilan pidana ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama: sistem peradilan pidana pada umumnya yang di dalamnya mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan elemen atau karakteristik sistem peradilan pidana, instrument internasional mengenai sistem peradilan pidana, kebijakan formulasi serta penegakan hukum dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, model-model sistem peradilan pidana, teori pemidanaan, dan pembaharuan hukum pidana. Kedua sistem peradilan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana tertentu yang di dalamnya meliputi sistem peradilan pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistem peradilan pidana militer |
| 13. | 81302-0213 | Viktimologi | Mata kuliah ini membahas aliran-aliran dan teori-teori viktimologi, dasar/alasan pemberian perlindungan kepada korban dalam sistem peradilan pidana, serta mekanisme pemenuhan terhadap hak-hak korban baik oleh negara maupun pelaku tindak pidana |
| 14. | 81302-0214 | Teori Hukum Dalam Ekonomi | Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar hukum ekonomi untuk wawasan dan kemampuan mahasiswa menganalisis kasus terkait hukum ekonomi dan dampaknya bagi kebijakan pengaturan pembangunan ekonomi Indonesia, mata kuliah ini sebagai dasar untuk mendalami mata kuliah berbasis kegiatan pembangunan ekonomi. |
| 15. | 81302-0215 | Hukum Korporasi | Mata kuliah ini membahas mengenai hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Mata Kuliah ini terdiri dari 9 (sembilan) level kompetensi, yang terdiri dari : (1) Pengantar Hukum Perusahaan; (2) Badan Usaha; (3) Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum; (4) Badan Hukum : Perseroan |

| | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| | | | Terbatas; (5) Badan Hukum : BUMN; (6) Badan Hukum : Koperasi; (7) Badan Hukum : Yayasan; (8) Tanggung Jawab Perusahaan; serta (9) Kapita Selekta Hukum Perusahaan. |
| 16. | 81302-0216 | Kapita Selekta Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan | Mata Kuliah ini menguraikan atau menganalisis mengenai sistem keuangan dan lembaga-lembaga pembentuk sistem keuangan yang terdiri dari Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar tentang sistem keuangan, lembaga keuangan dalam sistem keuangan, sistem keuangan dan sistem perbankan Indonesia, kebijakan moneter dan perbankan Indonesia, serta lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing, reksa dana dan <i>factoring</i> (anjak-piutang). |
| 17. | 81302-0217 | Hukum dan Kebijakan Publik | Mata kuliah ini membahas tentang Kebijakan public yaitu: keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, dilaksanakan oleh Administrasi Negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, maka diperlukan: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga |

| | | | |
|-----|-------------------|---|---|
| | | | <p>dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.</p> |
| 18. | 81302-0218 | Hukum Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah | <p>Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang landasan teoritis hubungan pusat dan daerah; pengaturan dalam konstitusi, evolusi per-uu-an hubungan pusat dan daerah; kewenangan pusat dan daerah dalam sentripetal versus sentrifugal; permasalahan kontemporer seputar hubungan pusat dan daerah; pelaksanaan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah; dan hubungan pelayanan umum pemda; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pajak dan retribusi daerah; dan pembagian hasil pajak pusat dan daerah.berbagai aspek hukum, politik, sosial, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta praktek-prakteknya di berbagai negara. Pada saat ini, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan keniscayaan di hampir seluruh negara serta selalu merupakan isu aktual, politis dan strategis pada pembahasan serta pembentukan dan pengelolaan sistem pemerintahan negara. Materi kuliah diawali dengan sejarah dan perkembangan teori desentralisasi serta implementasi otonomi daerah, baik pada masa lalu maupun masa kini dan prospeknya dimasa depan.</p> |
| 19. | 81302-0219 | Hukum Dan Hak Asasi Manusia | <p>Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. Pembahasan difokuskan kepada aspek-aspek teori dan filsafat, konstitusi, politik, sosial dan implementasi Hak Asasi Manusia.</p> |

| | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|--|
| | | | Selain itu, juga dibahas mengenai hak dan kewajiban berbagai fihak dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai negara serta upaya hukum dan penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia, baik melalui peradilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan lain-lain. |
| 20. | 81302-0220 | Hukum Keuangan Negara | Hukum Keuangan Negara merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara. |
| 21. | 81302-0321 | Hukum Pidana Anak | mata kuliah ini akan dibahas perkembangan tentang hukum pidana anak, pertanggungjawaban pidana untuk anak, pemidanaan terhadap anak ditinjau dari segi yuridis dan pendekatan aspek-aspek non yuridis. Pembahasannya mencakup bagaimana bila anak yang menjadi korban kejahatan. Adanya keterikatan antara perlindungan hukum anak sebagai pelaku kejahatan dan anak sebagai korban kejahatan dan perlindungan anak dalam peradilan pidana anak. |
| 22. | 81302-0322 | Tindak Pidana Korupsi | Mata kuliah ini merupakan Tindak Pidana khusus di luar Tindak Pidana Umum sebagaimana diatur dalam KUHP, difokuskan materi Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, serta pidan dan pemidanaan. |
| 23. | 81302-0323 | Tindak Pidana Lingkungan | Mata kuliah ini merupakan Tindak pidana khusus, difokuskan materi penegakan hukum lingkungan, baik hukum lingkungan administrasi, perdata, maupun pidana, pendekatan ekonomi serta penggunaan instrumen-instrumen ekonomi, seperti fasilitas perpajakan, audit lingkungan dan semua jenis insentif ekonomi yang dapat diterapkan dalam upaya perlindungan lingkungan. |
| 24. | 81302-0324 | Cyber Crime | Mata kuliah ini membahas tentang Perkembangan teknologi semakin pesat akses berbagai kemudahan, kemudian menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan di dunia cyber sudah demikian meresahkan sehingga Indonesia pun sudah menganggap kejahatan siber (cyber crime) ini sebagai salah satu tindak pidana yang harus diberantas |

| | | | |
|-----|-------------------|------------------------|---|
| | | | dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam perkuliahan cyber crime ini, mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan cyber crime, bagaimana pencegahannya dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Mahasiswa dalam perkuliahan ini akan dipermudah dengan pemberian contoh kasus yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. |
| 25. | 81302-0325 | Hukum Persaingan Usaha | Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha ini memberikan penjelasan mulai dari etika bisnis dari sisi sejarah dan prinsip-prinsipnya sampai pada munculnya pengaturan hukum persaingan usaha, macam-macam perjanjian dan kegiatan bisnis yang dilarang dan pengawasan serta penegakan persaingan usaha. Dengan mempelajari Hukum Persaingan Usaha ini, maka mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan mampu menjelaskan persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang curang sampai pada upaya pengawasan dan penegakkan hukumnya. |
| 26. | 81302-0326 | Hukum Investasi | Mata Kuliah Hukum Investasi membahas tentang Fungsi pasar modal dalam menunjang pembangunan ekonomi sebagai pranata ekonomi yang menjadi alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan investasi bagi masyarakat; pelaku pasar modal; Persiapan perusahaan dalam proses <i>go public</i> melalui penawaran umum, khususnya yang terkait dengan aspek hukum ekonomi baik sebelum emisi, pada saat emisi dan sesudah emisi; khususnya perjanjian-perjanjian yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen yang harus dipelajari; memahami aspek-aspek yuridis dalam sistem dan mekanisme perdagangan di bursa efek; mengetahui fungsi dan kewenangan regulator; self regulatory organization yang terlibat dalam mekanisme perdagangan (Bursa LKP dan LPP); lembaga lembaga penunjang yang diperlukan dalam transaksi di pasar modal (wali amanat, kustodian, |

| | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | profesi penunjang pasar modal konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penilai; perkembangan instrumen-instrumen yang diperdagangkan di bursa beserta keuntungan dan kerugian, jenis-jenis pelanggaran di pasar modal dan mekanisme penyelesaiannya, perkembangan hukum pasar modal, khususnya perkembangan perjanjian di pasar modal (<i>trust, penitipan kolektif, nominee</i>), dan perkembangan obyek transaksi dikaji menurut hukum kebendaan, disharmoni sistem hukum (<i>common law dan civil law</i>), penerapan <i>good corporate govermance</i> di pasar modal, keterkaitan dengan UU lain (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UU TPPU, UU Anti Monopoli, dll.) |
| 27. | 81302-0327 | Hukum Jaminan | Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas tentang Jaminan secara keseluruhan yang terbagi menjadi Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Pembahasan akan dimulai dengan Pendahuluan, Penggolongan Jaminan, Hak-hak yang memberi Jaminan dan macam lembaga Jaminan Khusus seperti Borgtoch, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek, Mortgage dan Hak Tanggungan Hingga pada perkembangan masing-masing lembaga. |
| 28. | 81302-0328 | Hukum Organisasi Perusahaan | Mata kuliah ini membahas bagaimana pengorganisasian suatu perusahaan, baik pada perusahaan swasta maupun pada perusahaan negara (BUMS dan BUMN), baik pada perusahaan perseorangan maupun pada perusahaan persekutuan, baik pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun pada lembaga pembiayaan. Peran, kedudukan dan tanggung jawab organ perusahaan dalam mengemudikan perusahaan termasuk organ LKB dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan dan peleburan perusahaan. |